

**RINGKASAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2018**



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

I. PENDAHULUAN

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2018 disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun Tahun 2018 merupakan sinkronisasi antara kebijakan Pemerintah Kabupaten Madiun dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang disepakati secara bersama-sama antara Pemerintah Kabupaten Madiun dengan DPRD Kabupaten Madiun. Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai instrumen perencanaan anggaran dan dasar penyusunan prioritas dan plafon APBD.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Pada tahun 2018 diperkirakan perkembangan ekonomi di Kabupaten Madiun akan tetap fokus pada pengembangan infrastruktur untuk mendukung perkembangan Kecamatan Mejayan sebagai pusat pemerintahan, sehingga potensi ke depan akan baik bagi perkembangan pasar properti, selain itu dengan percepatan pembangunan di Kecamatan Mejayan dapat menggairahkan aktivitas perekonomian yang mengakibatkan ekspansi bisnis di wilayah ini jadi berkembang, aktivitas investor pun diperkirakan akan terus meningkat dan diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun pada tahun 2018 bisa ditargetkan berada pada kisaran 5,48 %. Peningkatan pembangunan ekonomi seharusnya sejalan dengan optimalisasi penyerapan anggaran pemerintah daerah untuk kepentingan kemakmuran masyarakat seperti pembangunan infrastruktur. Namun bila kita lihat struktur belanja daerah Kabupaten Madiun yang masih didominasi oleh belanja pegawai dan barang jasa serta proporsi belanja modal masih relatif kecil, hal ini yang menjadi hambatan bagi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun 2017 - 2018

No	Indikator Makro	Satuan	Tahun	
			2017**)	2018**)
1	PDRB (ADH Berlaku)	Rp. Juta	17.288.322,85	19.308.859,85
2	PDRB (ADH Konstan)	Rp. Juta	11.926.907,06	12.616.045,05
3	Inflasi (IHK)	(%)	4,50	3,70
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	(%)	5,39	5,48
5	Income Perkapita	Rp. Ribu	25.311	28.270

**) = Angka Target

I. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH(R-APBD) TAHUN 2018

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa substansi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 adalah berbasis kinerja yang mengutamakan pada pencapaian hasil melalui input yang direncanakan berupa program dan kegiatan. Adapun arah pembangunan Kabupaten Madiun di tahun 2018 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013 – 2018.

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2018 harus mempertimbangkan berbagai asumsi yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan maupun pencapaian target kinerja APBD Tahun Anggaran 2018. Diantara asumsi dasar yang diperhitungkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 adalah kondisi makro ekonomi nasional (APBN 2018), kebutuhan Belanja Gaji PNS, dan asumsi-asumsi lain yang dipandang signifikan.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi Kabupaten Madiun, maka sinkronisasi kebijakan antara pemerintah Kabupaten Madiun dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun TA 2018 sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan Ekonomi diperkirakan sekitar 5,48% ;
- b. Tingkat pengangguran terbuka / TPT sebesar 4,10% ;
- c. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,78 % ;
- d. Laju inflasi diperkirakan sekitar 3,70%.

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain : konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang

Laju inflasi di Kabupaten Madiun selama 5 tahun terakhir sangat berfluktuasi. Setelah mengalami penurunan menjadi 3,51% pada tahun 2012, laju inflasi kembali meningkat tajam 7,10% tahun 2013 dan meningkat lagi menjadi 7,24% pada tahun 2014 dan ada tahun 2015, tingkat inflasi mengalami penurunan tajam menjadi 2,66%. Pada tahun 2016 mengalami penurunan, menjadi 2,25%.

Dalam konteks perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2018, meningkatnya laju inflasi akan berpengaruh terutama pada kemampuan daerah dalam pembiayaan belanja pembangunan. Tahun 2018 inflasi Kabupaten Madiun ditargetkan sebesar 3,70%.

PDRB merupakan jumlah nilai tambah (barang dan jasa) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun tahun 2015 sebesar 5,26% dan pada tahun 2016 sebesar 5,27%, sedangkan tahun 2017 di rencanakan sebesar 5,39%, pergerakan ekonomi tampak dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Madiun. Hasil analisis pertumbuhan PDRB, dapat disajikan dalam tabel, sebagai berikut :

**Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2014-2016
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Juta Rupiah)
Kabupaten Madiun**

No	Kategori	2014		2015		2016*)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,281,387.0	3.357.208,1	3.368.091,2	31,46	3.457.751,7	30,63
2	Pertambangan dan Penggalian	109,540.4	110.832,3	110.832,3	1,04	111.985,0	0,99
3	Industri Pengolahan	1,008,777.5	1.073.146,3	1.073.146,3	10,02	1.142.572,7	10,12
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10,291.6	10.448,6	10.448,6	0,10	10.764,0	0,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17,454.5	18.244,8	18.244,8	0,17	19.251,9	0,17
6	Konstruksi	1,116,554.4	1.189.539,7	1.189.539,7	11,11	1.265.670,2	11,21
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,602,740.2	1.707.995,8	1.707.995,8	15,95	1.827.736,4	16,19
8	Transportasi dan Pergudangan	156,728.8	169.467,5	169.467,5	1,58	183.154,7	1,62
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	227,335.6	244.428,6	244.428,6	2,28	262.651,1	2,33
10	Informasi dan Komunikasi	767,688.6	834.418,4	834.418,4	7,79	911.769,0	8,08
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	278,034.8	297.949,1	297.949,1	2,78	321.894,9	2,85
12	Real Estate	178,822.7	189.978,8	189.978,8	1,77	204.569,2	1,81
14	Jasa Perusahaan	33,793.4	36.287,8	36.287,8	0,34	38.657,4	0,34

No	Kategori	2014		2015		2016*)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	596,882.7	626.082,8	626.082,8	5,85	649.623,5	5,75
16	Jasa Pendidikan	439,836.3	466.857,5	466.857,5	4,36	500.844,8	4,44
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	88,287.1	93.666,2	93.666,2	0,87	99.164,4	8,88
18	Jasa lainnya	255,528.6	267.679,5	267.679,5	2,50	282.696,4	2,50
	PDRB	10,169,684.3	10.694.231,9	10.705.115,0	100	11.290.757,2	100

Sumber: Hasil koordinasi Bappeda Kabupaten Madiun dengan BPS

Dalam tabel nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Tahun 2014 sampai dengan 2016 atas dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Madiun terlihat bahwa pada Tahun 2016 sektor dengan kontribusi 10% ke atas adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mencapai nilai 31,46% kemudian disusul sektor Perdagangan Besar, dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang mencapai 15,95 %, Konstruksi mencapai 11,11% dan sektor Industri Pengolahan mencapai 10,02% sedangkan dengan nilai 10% ke bawah ditempati sektor Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang serta sektor lainnya.

**Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2014-2016
Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)
Kabupaten Madiun**

No	Kategori	2014		2015		2016*)	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.388.232,1	35,02	4.813.274,6	34,7	5.309.918,5	34,29
2	Pertambangan dan Penggalian	134.033,4	1,07	144.714,9	1,04	158.297,7	1,02
3	Industri	1.222.998,8	9,76	1.357.607,0	9,78	1.512.966,3	9,77

No	Kategori	2014		2015		2016*)	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
	Pengolahan						
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10.227,7	0,08	11.448,6	0,08	13.056,3	0,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19.389,1	0,15	21.100,1	0,15	23.769,9	0,15
6	Konstruksi	1.448.646,0	11,56	1.650.480,7	11,90	1.883.956,4	12,17
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.876.430,0	14,97	2.061.330,1	14,86	2.280.647,4	14,73
8	Transportasi dan Pergudangan	189.148,3	1,51	217.549,4	1,57	253.859,6	1,64
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	267.682,7	2,14	297.178,4	2,14	332.974,4	2,15
10	Informasi dan Komunikasi	782.969,1	6,25	880.901,0	6,35	1.028.110,9	6,64
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	322.120,0	2,57	361.934,9	2,61	408.986,3	2,64
12	Real Estate	199.454,5	1,59	226.419,8	1,63	261.704,4	1,69
14	Jasa Perusahaan	41.024,9	0,33	46.133,0	0,33	51.720,8	0,33
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	734.900,7	5,86	797.994,8	5,75	863.437,8	5,58
16	Jasa Pendidikan	516.054,9	4,12	564.844,8	4,07	627.295,4	4,05

No	Kategori	2014		2015		2016*)	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	99.675,8	0,80	108.932,8	0,79	120.251,7	0,78
18	Jasa lainnya	278.758,0	2,22	312.822,3	2,25	355.248,6	2,30
	PDRB	12.531.746,0	100	13.874.667,1	100	15.486.202,3	100

Sumber: Hasil koordinasi Bappeda Kabupaten Madiun dengan BPS

Dalam tabel nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Tahun 2014 s/d 2016 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Madiun terlihat bahwa Tahun 2016 sektor dengan kontribusi 10 persen ke atas adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mencapai 34,29% kemudian disusul sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar, 14,73% sektor Konstruksi mencapai 12,17% sedangkan dengan nilai 10 persen ke bawah ditempati sektor lainnya.

**Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)
dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2016
Kabupaten Madiun**

No.	Kategori	Pertumbuhan*)	
		Hb	Hk
		%	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34,29	30,63
2	Pertambangan dan Penggalian	1,02	0,99
3	Industri Pengolahan	9,77	10,12
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,17
6	Konstruksi	12,17	11,21

No.	Kategori	Pertumbuhan*)	
		Hb	Hk
		%	%
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,73	16,19
8	Transportasi dan Pergudangan	1,64	1,62
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,15	2,33
10	Informasi dan Komunikasi	6,64	8,08
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,64	2,85
12	Real Estate	1,69	1,81
14	Jasa Perusahaan	0,33	0,34
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,58	5,75
16	Jasa Pendidikan	4,05	4,44
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,78	8,88
18	Jasa lainnya	2,30	2,50
	PDRB	100	100

Sumber : Hasil koordinasi Bappeda Kabupaten Madiun dengan BPS

II. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2018 dapat dijabarkan sebagaimana tabel tersebut di bawah ini :

Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2018

NO.	U R A I A N	R APBD 2018
1	2	3
I	PENDAPATAN	1,813,416,063,919.92
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	190,497,937,259.92
2	DANA PERIMBANGAN	1,252,220,623,000.00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	370,697,503,660.00
II	BELANJA	1,839,427,522,279.92
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,158,782,363,911.92
2	BELANJA LANGSUNG	680,645,158,368.00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(26,011,458,360.00)
III	PEMBIAYAAN DAERAH	
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	33,011,458,360.00
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	7,000,000,000.00
	PEMBIAYAAN NETTO	26,011,458,360.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-